

## **KAJIAN SUKSES IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT STUDI KASUS: PEMERINTAH KOTA BOGOR**

**Analisis dengan Perspektif Good Governance**

Iqbal Aidar Idrus<sup>1</sup>, Ummi Zakiyah<sup>2</sup>, Lisa Hadiyah<sup>3</sup>

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

[idrusiqbal@yahoo.com](mailto:idrusiqbal@yahoo.com) [zakiyahmyamin@yahoo.co.id](mailto:zakiyahmyamin@yahoo.co.id)

### **ABSTRACT**

*Good governance is a conception of a clean, democratic, and effective government administration, and in it governs a synergistic and constructive relationship between government, private business and the public. The use of information technology that can improve the relationship between government and other parties. E-Government is an effort to develop electronic (electronic) governance in order to improve the quality of public services effectively and efficiently, new services, increased citizen participation and an enhancement to the global information infrastructure. Local Government is a forum for implementing E-Government. Bogor City Government is one area that is considered successful implement e-Government. Bogor City has initiated eGovernment initiatives since 2008-2009 long before the Inpres was issued and has successfully won numerous awards for its success in e-Government implementation. The results show that the overall implementation of E-Government has run well but has not been optimally accessing public involvement. Ease of e-government is only enjoyed by a small number of people who are familiar with information technology. The main challenge of e-government development is the ability and readiness of management and the culprits so it is not a mere technological sophistication.*

**Key Word: E-Government, Local Government, Good Government**

---

<sup>1</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

## ABSTRAK

*Good governance* merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih, demokratis, dan efektif, serta didalamnya mengatur pola hubungan yang sinergis dan konstruktif antara pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. Penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. E-Government adalah upaya untuk mengembangk-an penyelenggaraan pemerintahan yang ber-basis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien, layanan-layanan baru, peningkatan partisipasi warga dan adanya suatu peningkatan terhadap *global information infrastructure*. Pemerintah Daerah adalah satu wadah untuk pengimplementasian E-Government. Pemkot Bogor merupakan salah satu daerah yang dianggap berhasil mengimplementasikan e - Government. Kota Bogor telah memulai inisiatif eGovernment sejak 2008-2009 jauh sebelum Inpres dikeluarkan serta telah berhasil memperoleh berbagai penghargaan atas keberhasilannya dalam implementasi e - Government. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan E-Government secara keseluruhan suah berjalan dengan baik namun belum optimal mengakses keterlibatan publik. Kemudahan *e-government* hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat yang sudah familiar dengan teknologi informasi. Tantangan utama dari pengembangan *e-government* adalah kemampuan dan kesiapan manajemen serta para pelakunya sehingga bukanlah kecanggihan teknologi belaka.

**Kata Kunci:** E-Government, Pemerintah Daerah, Good Governance

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang saat ini masih terhitung sebagai negara berkembang tengah berupaya untuk terus meningkatkan perekonomiannya dengan harapan keluar dari status negara berkembang dan menjadi suatu negara yang maju. Salah satu usaha meningkatkan perekonomian negara adalah dengan mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah *good governance*. *Good governance* merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih, demokratis, dan efektif, serta didalamnya mengatur pola hubungan yang sinergis dan konstruktif antara pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat (Haryanto dan Sahmuddin, 2008) Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Widjaja, 2002).

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2002) Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

E-government (e-gov) intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Karena itu, ada dua hal utama dalam pengertian e-gov di atas ; yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu, dan, yang kedua, tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintahan dapat berjalan lebih efisien. Kendati demikian, e-gov bukan berarti mengganti cara pemerintah dalam berhubungan dengan masyarakat. Dalam konsep e-gov, masyarakat masih bisa berhubungan dengan pos-pos pelayanan, berbicara melalui telepon untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, atau mengirim surat. Jadi, e-gov sesuai dengan fungsinya, adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain.

Kesimpulannya e-gov adalah upaya untuk mengembangk-an penyelenggaraan pemerintahan yang ber-basis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien Mengapa e-gov menjadi perlu dan penting untuk dilaksanakan ? alasannya adalah : secara tradisional biasanya interaksi antara seorang warga negara atau institusi sosial dengan badan pemerintah selalu berlangsung di kantor-kantor pemerintahan. Namun seiring dengan pemunculan teknologi informasi dan komunikasi ( TIK ) semakin memungkinkan untuk mendekatkan pusat-pusat layanan pemerintah kepada setiap klien. Sebagai contoh ; jika ada pusat layanan yang tak terlayani oleh

badan pemerintah, maka ada kios-kios yang didekatkan kepada para klien atau dengan penggunaan komputer di rumah atau di kantor-kantor. E-gov memberikan peluang baru untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, dengan cara ditingkatkannya efisiensi, layanan-layanan baru, peningkatan partisipasi warga dan adanya suatu peningkatan terhadap *global information infrastructure*. Dengan demikian e-gov akan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai jalan untuk mewujudkan *good government*. Melalui e-Government, pelayanan pemerintah akan berlangsung secara transparan, dapat dilacak prosesnya, sehingga dapat dianggap akuntabel. Unsur penyimpangan dapat dihindarkan dan pelayanan dapat diberikan secara efektif dan efisien.

Maka dari pada itu, dalam peper ini mengambil study kasus di Pemerintah kota (Pemkota) Bogor, dengan pertimbangan bahwa Pemkot Bogor merupakan salah satu daerah yang dianggap berhasil mengimplementasikan e - Government. Kota Bogor telah memulai inisiatif eGovernment sejak 2008-2009 jauh sebelum Inpres dikeluarkan serta telah berhasil memperoleh berbagai penghargaan atas keberhasilannya dalam implementasi e - Government. Pada tahun 2009, Majalah Warta Ekonomi memberikan e-Government award sebagai juara terbaik selain kabupaten Jembrana dan kota Surabaya pada kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Pengaplikasi e-Government. Di tahun yang sama, Kota Bogor juga meraih penghargaan dari Universitas Gunadarma sebagai juara II pada kategori Website Terbaik Tingkat II se Indonesia (Junaidi, 2011). Pada tahun 2011.

Bogor memperoleh penghargaan ICT Pura dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tingkat nasional dimana kota Bogor terpilih menjadi yang terbaik dari 5 kota di wilayah propinsi Jawa Barat dan mendapat predikat madya tingkat nasional serta dianggap sebagai kota yang telah siap menghadapi era ekonomi digital. Selain itu pada tahun 2013, kota Bogor juga memperoleh penghargaan IDSA (Indonesia Digital Society Award) sebagai Silver Champion untuk kategori Community dan tahun 2014 Bogor berhasil meraih juara runner-up satu dalam

penghargaan IDSA 2014 untuk kategori Pemerintah kota. Oleh karena itu dalam penelitian ini kota Bogor dapat dijadikan rujukan bagi lembaga pemerintah lain dalam proses implementasi e-Government. mendaftarkan sebagai peserta tender tanpa harus datang langsung ke kantor pemda. Program unggulan e-government Pemerintah Kota Bogor lainnya adalah Kantaya, yaitu semacam e-offic yang akan meningkatkan interaksi antar instansi dengan cepat dan akurat, serta memberikan kualitas layanan publik yang akuntabel dan transparan. Pentingnya partisipasi masyarakat juga dinilai penting sebagaimana terlihat dengan bentuknya komunitas berbasis online berupa jaringan online RT-RW.

## B. PEMBAHASAN

Pemerintah Kota Bogor dalam menyukseskan Implementasi E-government dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan pemerintah dengan tujuan mencapai good governance. E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, ataupun administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Sedangkan, The World Bank Group mendefinisikan e-Government sebagai berikut: “e-Government berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti Wide Area Network, Internet dan mobile computing) oleh organisasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga Negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan.” (The World Bank Group, 2001).

UNDP United Nation Development Programme (UNDP) juga memberikan definisi tersendiri dengan lebih singkat untuk E-Government : “E-Government adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dari agen pemerintah.” Setelah mengetahui bagaimana lembaga-lembaga memberikan definisi akan E-Government, para ahli pun turut mendefinisikan E-Government. Zweers and

Planque (2001) memberikan definisi : “E-Government berhubungan dengan penyedia informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronik, dengan dan oleh pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan”. (dalam Indrajit, 2004).

Alwi Hasyim Batubara membahas konsep *good governance* dalam otonomi daerah sebagai suatu syarat mutlak untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang dapat mengikuti tuntutan perubahan sesuai dengan kondisi masyarakat. Beti Nasution melihat perlunya pelatihan sumber daya manusia berbasis kompetensi, dilanjutkan tentang perlunya perhatian perdagangan ekspor dan impor oleh Dahlia Hafni Lubis. Di sisi lain, Erika Revida melihat munculnya perilaku kekerasan sehingga manajemen konflik perlu dikembangkan untuk menjawab persoalan tersebut. M. Arifin Nasution lebih operasional dalam pengembangan otonomi daerah melalui konsep pemberdayaan kelurahan, diikuti tulisan mengenai pentingnya pengembangan kawasan melalui paradigma perencanaan partisipatif oleh Marlon Sihombing.

Selanjutnya Antonius Sitepu mengkaji secara teoretis pendekatan realisme politik, ditutup dengan paparan Rasudyn Ginting tentang struktur pemerintahan negara Republik Indonesia pasca-amandemen UUD 1945<sup>3</sup>, Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu :

1. pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik;

<sup>3</sup> Alwi Hasyim Batubara, 2006, Konsep Good Governance dalam Konsep Otonomi Daerah. Jurnal Analisa Administrasi dan Kebijakan.

2. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Impres No. 3 Tahun 2003 menjelaskan enam strategi pengembangan *e-Gov* yakni:

- 1) Bagaimanamengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas
- 2) Bagaimana menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik
- 3) Bagaimana Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal
- 4) Bagaimana meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi
- 5) Bagaimana mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat; dan
- 6) Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

Kota Bogor telah memulai inisiatif e-Government sejak 2008-2009 dan meraih beragam penghargaan atas keberhasilannya dalam menerapkan e-Government khususnya tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Berbagai terobosan dan inovasi yang dilakukan seperti membangun infrastruktur jaringan intranet dan internet SKPD dan Kelurahan se-Kota Bogor, mengimplementasikan e-procurement Kota Bogor, mengintegrasikan POS PBB (Payment Online System Pajak Bumi dan Bangunan), mengintegrasikan SIAK Online Kota Bogor hingga mengimplementasikan aplikasi Kantaya. Pengembangan Infrastruktur jaringan internet Pemkot Bogor yang telah mencapai 40 Mbps sehingga meningkatkan kecepatan jaringan internet di Pemerintah Kota Bogor. Selain itu pemeliharaan dan peningkatan back bone sebanyak 18 BTS yang mencakup kelurahan dan seluruh SKPD di Kota Bogor dengan jaringan Fiber Optik (FO) di 20 titik merupakan upaya peningkatan kualitas sambungan internet dan intranet di Kota Bogor. Disamping

infrastruktur, pengembangan aplikasi e-Government seperti SIM Kantaya, Kepegawaian, Arsip, Perpustakaan, Surat, Pembangunan Daerah serta aplikasi lain pendukung pemerintahan sehingga tercapai birokrasi yang efektif dan efisien. Terjaminnya keberlangsungan Website dan Webmail [www.kotabogor.ac.id](http://www.kotabogor.ac.id) sehingga masyarakat dapat mengakses informasi pada Website secara online dan telah dimuat dalam berita sebanyak 5915 judul dengan tingkat kunjungan hingga akhir tahun 2013 mencapai 12 juta kunjungan (Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, 2013). Tidak ketinggalan penerapan e-procurement untuk pengadaan barang dan jasa, yaitu proses tender atau lelang proyek melalui sistem internet dimana hal ini ternyata mampu mengurangi proses KKN yang kerap terjadi dalam proses tender.

Manfaat lainnya adalah efisiensi anggaran sekitar 15% kembali ke kas daerah dan penyedia barang dan jasa dapat mengurangi biaya transportasi karena mereka dapat mendaftar sebagai peserta tender tanpa harus datang langsung ke kantor pemda. Program unggulan e-government Pemerintah Kota Bogor lainnya adalah Kantaya, yaitu semacam e-office yang akan meningkatkan interaksi antar instansi dengan cepat dan akurat, serta memberikan kualitas layanan publik yang akuntabel dan transparan. Pentingnya partisipasi masyarakat juga dinilai penting sebagaimana terlihat dengan terbentuknya komunitas berbasis online berupa jaringan online RT-RW.

Dalam implementasi e-government, Pemerintah Kota Bogor bekerjasama dengan BPPT untuk pengkajian, penerapan, dan pemasyarakatan teknologi untuk mendukung pembangunan daerah Kota Bogor. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan Pemerintah Kota Bogor bisa memiliki sebuah jaringan informasi yang berbasis teknologi dan terpadu, mencakup bidang kerja seperti kepegawaian, kesehatan, pendidikan sampai bidang arsip dan perpustakaan, demikian juga dalam bidang pelayanan perijinan dan berbagai pelayanan langsung kepada masyarakat. Melalui pengembangan e-government, maka masyarakat akan lebih mudah berhubungan dengan Pemerintah Kota Bogor, baik pada saat membutuhkan informasi atau pada saat mereka membutuhkan pelayanan untuk melancarkan

kegiatan. Pemda Kota Bogor pun bekerjasama dengan Depkominfo dalam mengimplementasikan migrasi dan penggunaan perangkat lunak legal atau free open source software dan interoperabilitas data. Tidak hanya lembaga pemerintah, pihak swasta seperti PT. Digital Wireless Indonesia (Diginet) juga menjadi mitra Kota Bogor untuk pemanfaatan tower triangle milik Pemkot Bogor. Kedepannya, Pemkot Bogor ingin mengembangkan e-Government yang terintegrasi sesuai agenda reformasi birokrasi nasional serta pengembangan Kota Bogor sebagai Smart Governance dimana setiap SKPD memiliki sistem informasi baik untuk layanan masyarakat, dunia usaha maupun layanan internal sesuai dengan prioritas kebutuhan secara bertahap. Dari segi infrastruktur, pengembangan data center dan data recovery yang baik untuk menjamin availability dan peningkatan keamanan informasi.

Selain itu, pembangunan telekomunikasi internal Pemkot yang berbasis internet (VoIP, Teleconference, dll). Tidak ketinggalan juga peningkatan kuantitas, kapasitas dan kapabilitas SDM di bidang TIK menjadi prioritas pengembangan e - Government.

Sebagaimana yang ditetapkan pada PP no.56 Tahun 2003 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1) menerangkan bahwa Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan oleh daerah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mencakup:

1. APBD dan Realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota
2. Neraca Daerah
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan Daerah
5. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantu
6. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, dan
7. Data yang terkait dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah

Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang

berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Untuk dapat melaksanakan *e-government* tersebut baik pemerintah pusat daerah harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerjanya yang antara lain meliputi :

- a) Pemerintah harus mengembangkan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga-lembaga negara lain, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat internasional. lembaga negara lain, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat lembaga negara lain, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat
- b) Dikembangkan sistem manajemen modern dengan organisasi berjaringan sehingga dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali.kembangkan sistem manajemen modern dengan organisasi berjaringan sehingga dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas kembangkan sistem manajemen modern dengan organisasi berjaringan sehingga dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas
- c) Pemerintah harus melonggarkan dinding pemisah yang membatasi interaksi dengan sektor swasta,membentuk kemitraan dengan dunia usaha ( Pemerintah harus melonggarkan dinding pemisah yang membatasi interaksi dengan sektor swasta, organisasi pemerintah harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (*publicprivate partnership* Pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Pemerintah harus melonggarkan dinding pemisah yang membatasi interaksi organisasi pemerintah harus lebih terbuka untuk

- d) Pemerintah harus mampu memanfaatkan kemaju meningkatkan kemampuan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik.

Dengan demikian pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju pemerintah dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat sistem manajemen dan pemerintah bekerja secara terpadu untuk informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju *e-government*. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. *partnership*).

Teknologi informasi untuk mengolah, mengelola, menyalurkan, dan Dengan demikian pemerintah harus segera melaksanakan proses masi tersebut, pemerintah dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi menyederhanakan akses ke semua, *E-government* juga diyakini memperluas partisipasi publik dimana masyarakat di Bogor dimungkinkan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan oleh pemerintah khususnya dalam perbaikan produktifitas dan efisiensi birokrasi termasuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan fakta, pelaksanaan *e-government* di Kota Bogor belum optimal mengakses keterlibatan publik. Kemudahan *e-government* hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat yang sudah familiar dengan teknologi informasi. Tantangan utama dari pengembangan *e-government* adalah kemampuan dan kesiapan manajemen serta para pelakunya sehingga bukanlah kecanggihan teknologi belaka.

### C. PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan e-government di kota Bogor sudah berjalan dengan baik, namun e-government yang sudah tersedia justru belum dinikmati oleh masyarakat secara optimal artinya belum semua pelayanan yang tersedia secara e-government diakses oleh masyarakat. Baru segelintir atau pihak-pihak tertentu yang sudah mulai sadar dengan kemajuan teknologi saja yang menggunakan e-government. Hal ini berarti kesiapan pemerintah tidak berjalan lurus dengan kesiapan warga masyarakatnya dalam menghadapi kemajuan dan kecanggihan secara global.

Secara keseluruhan implementasi e-gov di Indonesia pada dasarnya, masih separoh jalan dan masih jauh di bawah standar yang ideal dan yang diinginkan. Kekurangan idealnya bukan saja dalam konteks lokal namun juga dalam konteks global. Capaian secara kuantitatif menunjukkan progress yang cukup berarti namun dari sisi kualitas belum memadai karena kekurangan di dalam SDM, infrastruktur serta regulasinya. Oleh karena itu maka harus dilakukan penyempurnaan konsep dan strategi pelaksanaan e-gov dari berbagai sisi.

Adanya regulasi dan standard pembangunan e-gov perlu dibuat agar tidak terjadi pendefinisian dan pemaknaan e-gov secara sendirisendiri oleh pihak penyelenggara yaitu pemerintah daerah. Secara manajerial, e-gov yang dilaksanakan oleh pemda meski mengikuti parameter panduan dari depkominfo namun secara nyata masih berorientasi pada web presence saja 2 tahapan lainnya yaitu transaksi, dan transformasi masih diabaikan untuk dijalankan di mana dalam paper ini kota Bogor banyak mendapatkan penghargaan baik dalam maupun luar negeri dimana E-Government yang pemerintah lakukan berjalan dengan baik dimana sebagian kecil saja dalam infrastruktur, pengembangan aplikasi e-Government seperti SIM Kantaya, Kepegawaian, Arsip, Perpustakaan, Surat, Pembangunan Daerah serta aplikasi lain pendukung pemerintahan sehingga tercapai birokrasi yang efektif dan efisien sehingga pemerintah ataupun daerah – daerah lain bisa mencontoh Kota Bogor dalam mengimplemintasikan E-Governmentnya dengan baik dalam pelayanan masyarakat. Dengan demikian perlu

dilakukan sosialisasi ulang secara komprehensif melalui diklat, kursus dan workshop kepada para penyelenggara situs web daerah. Sosialisasi ulang penyelenggaraan e-gov tidak saja membenahi masalah *back office* nya atau segi manajerialnya tetapi juga membenahi *front office* nya yaitu content yang disediakan bagi publik untuk diakses dan digunakan. Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

**DAFTAR PUSTAKA**

Batubara Alwi Hasyim, 2006, *Konsep Good Governance dalam Otonomi Daerah*, Jurnal, Medan.

Dewi sophia Annasia, 2013, *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Implementasi E – Government*, Skripsi, Universitas Diponegoro.

Napitupulu Darmawan, 2015, *Kajian Faktor Sukses Implementasi E- Government*, Jurnal, Universitas Indonesia.

Ni Nyoman Dewei Pascarani, Dkk, *Implementasi Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jurnal, Universitas Undayana.

Sosiawan Arif Edwi, 2008, *Evaluasi Implementasi E- Government Pada Situs Web Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jurnal, Universitas Vetran Yogyakarta.

Sosiawan Arif Edwi, 2008, *Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi E- Government di Indonesia*, Jurnal, UPN Vetran Yogyakarta.